

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Migas merupakan sumber daya alam tidak terbarukan (*non-renewable resources*). Cadangan migas akan berkurang sejalan dengan aktivitas eksploitasi dan hanya akan bertambah jika penemuan cadangan baru lebih banyak ketimbang yang dieksploitasi. Penemuan cadangan baru terjadi melalui kegiatan eksplorasi yang memerlukan biaya besar. Eksplorasi dan eksploitasi migas merupakan kegiatan usaha hulu migas yang berdimensi jangka panjang, memerlukan investasi besar, dengan risiko pada sisi keuangan, teknis, dan operasional sangat tinggi. Usaha di sektor hulu migas menuntut profesionalisme tinggi dan sumber daya manusia yang handal. Berdasarkan tuntutan itu, perusahaan yang beroperasi di sektor migas, terutama di sektor hulu, umumnya berskala besar dan global yakni MNC asing.

Dengan karakteristik padat modal, penggunaan teknologi canggih, dan risiko kegagalan yang tinggi, menggunakan konsep bagi hasil atau *production sharing contract* dengan KKKS asing merupakan keputusan yang tepat. Sistem seperti ini dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan menghindarkan Indonesia dari paparan resiko dan ketidakpastian. Negara tidak terpapar risiko kegagalan eksplorasi karena biaya modal dalam kondisi tersebut tidak diganti dalam skema cost recovery. Pemerintah sebagai perwakilan negara juga memiliki kontrol baik atas manajemen operasional maupun kepemilikan sumber daya migas. Manajemen operasional hulu migas dipegang oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah dalam PSC. Dengan adanya institusi ini, kendali atas bisnis hulu migas sepenuhnya di tangan negara. Penerapan PSC di Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan supaya negara berperan lebih besar dengan mempunyai kewenangan manajemen kegiatan usaha hulu migas.

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia sebenarnya termasuk dalam jajaran segelintir negara yang memiliki sumber daya minyak dan gas bumi. Artinya, Indonesia memiliki daya tarik bagi investor di industri migas. Ironisnya, negara ini justru menghadapi persoalan serius dalam memacu investasi di sektor migas, khususnya di hulu karena karakteristik industri tersebut. Investasi dan kegiatan untuk eksplorasi justru terhambat. Padahal, cadangan dan produksi migas negara ini semakin merosot dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 2009 FDI di hulu migas menurun yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti krisis global pada akhir tahun 2008 dan fluktuasi harga komoditas migas di pasar global. Sementara faktor internal disebabkan oleh ketidakpastian regulasi di hulu migas, insentif yang tidak menarik, dan perizinan di hulu migas yang kompleks.

Dalam rangka meningkatkan produksi migas nasional, maka pemerintah harus bisa memperbaiki iklim investasi agar investor mau menanamkan modalnya dalam kegiatan eksplorasi di Indonesia. Untuk itu Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya, baik internal dan eksternal. Untuk upaya yang dilakukan di internal, Pemerintah Indonesia aktif melakukan pertemuan dengan negara lain untuk menarik investor dan juga melalui penandatanganan MoU di hulu migas, pemberian insentif kepada investor di hulu migas, pembuatan pelayanan investasi dan website online, dan penerbitan instruksi presiden nomor 2 tahun 2012. Sementara untuk upaya eksternal Pemerintah Indonesia melakukan joint study bersama *International Energy Agency* untuk mengevaluasi regulasi investasi di hulu migas dan bergabungnya Indonesia pada inisiatif global *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan FDI di hulu migas membuahkan hasil. Tercatat bahwa FDI di hulu migas menunjukkan tren meningkat pada 2010 hingga 2014. Upaya perbaikan iklim FDI di hulu migas sudah mengarah ke arah yang kondusif, namun mungkin belum menghasilkan sesuatu yang signifikan. Oleh karena itu kegiatan di hulu migas khususnya eksplorasi sudah seharusnya mendapat dukungan semua pihak. Generasi saat ini bisa menikmati hasil migas berkat kegiatan eksplorasi yang dilakukan dan didukung oleh generasi sebelumnya. Sudah sepatutnya generasi sekarang baik pemerintah, pihak KKKS

asing, dan didukung oleh masyarakat bekerja keras melakukan dan mendukung iklim FDI di hulu migas, agar kegiatan eksplorasi dapat dilakukan lebih intens sehingga menghasilkan lebih banyak produksi migas nasional.

IV.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan *Foreign Direct Investment*, didapat saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, antara lain perlu dilakukan kajian dan analisa yang lebih mendalam terhadap pentingnya keberadaan KKKS asing di sektor migas Indonesia ditengah semarak nasionalisme yang sedang terjadi agar kedaulatan Indonesia tetap terjaga. Selain itu perlu dianalisa lebih dalam terkait bergabungnya Indonesia ke dalam *Extractive Industries Tranparancy Initiative* dalam kaitannya dengan investasi di industri migas yang tentunya mengalami berbagai rintangan dan proses yang panjang.

